

RAK

Revisi Rencana Aksi Kinerja



Pengadilan Negeri
Hubungan Industrial
Gresik Kelas I/A

2025



**Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Pengadilan Negeri Gresik
Tahun 2025**

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Revisi Indikator Kinerja Utama dan Revisi Rencana Kerja Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan wewenang Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam rangka mewujudkan Visi yaitu:

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA Yang Agung“**

Dengan Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Revisi Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Gresik Kelas IA Tahun 2025 mencantumkan Program, Kegiatan, Target dan Anggaran, sebagaimana terlampir.

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			I	II	III	IV
1		a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	25%	45%	70%	96%
		b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	25%	50%	75%	98%
		c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para	25%	50%	75%	100%
		d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	25%	50%	75%	100%
		e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	25%	50%	75%	100%
		f. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	25%	50%	75%	95%
		g. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	n/a	n/a	n/a	n/a
		h. Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi	0%	0%	0%	2,5%
		i. Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi	0%	0%	0%	50%

		j. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	25%	50%	75%	100%
		k. Persentase Perkara Pidana Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	25%	50%	75%	100%
		l. Persentase Layanan Perkara Pidana Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	25%	50%	75%	96%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	25%	50%	75%	89%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan				
		• DIPA 01	25%	50%	75%	95%
		• DIPA 03	25%	50%	75%	95%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				
		• DIPA 01	25%	50%	75%	97%
		• DIPA 03	25%	50%	70%	80%
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1,5	2,2	2,7	3,2

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Koordinasi	✓		✓		2 Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kimwasmat (Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Teknis di Lingkungan Peradilan Umum)	750.000
2	Perkara Hukum Perseorangan: - Pendaftaran Berkas Perkara - Penetapan Hari Sidang - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan - Pemeriksaan di sidang pengadilan - Pengiriman petikan/salinan putusan kepada para pihak - Minutasi/Upaya Hukum - Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama - Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama - Eksekusi putusan pengadilan	✓	✓	✓	✓	375 Perkara		Perkara yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat	169.837.000

3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	✓	✓	✓	✓	103 OJ		Honor Advokat/ Pengacara Piket	36.000.000
4	Perkara Hukum Perseorangan (PRODEO): - Pengiriman Pemberitahuan/Panggilan - Penjilidan Berkas Perkara - Belanja ATK	✓		✓		2 Perkara		Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	720.000

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 17 November 2025

KETUA PENGADILAN

NEGERI/HUBUNGAN

PENGADILAN GRESIK KELAS IA


ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
NIP. 196807071996031002

